MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL: STUDI KASUS DESA TANJUNG PUCUK JAMBI

Annisa Uliandari[1], Elyanti Rosmanidar [2]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
email:annisauliandari07@gmail.com [1] elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id [2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah terhadap pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Tanjung Pucuk, Jambi. Pengelolaan dana desa yang sesuai prinsip syariah diharapkan mampu meningkatkan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan program pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi terkait pelaksanaan program dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah—seperti amanah, keadilan, dan musyawarah—berkontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta partisipasi aktif warga dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa berbasis syariah memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan di Desa Tanjung Pucuk..

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

This study examines the influence of Sharia-based village fund management on local community empowerment in Tanjung Pucuk Village, Jambi. The implementation of village funds guided by Sharia principles is expected to promote greater transparency, fairness, and sustainable development at the village level. Using a descriptive qualitative method, data were collected through observations, interviews, and document analysis related to village fund programs. The findings show that the application of Sharia principles—such as trustworthiness, justice, and collective decision-making—has a positive impact on community empowerment, particularly in enhancing local economic capacity and encouraging active public participation. Overall, Sharia-based management of village funds significantly contributes to strengthening sustainable community development in Tanjung Pucuk Village.

Keyword: Islamic Economics, Village Fund Management, Community Empowerment.

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1387
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENDAHULUAN

Sejak digulirkan pada tahun 2014, Dana Desa (DD) telah menjadi instrumen fiskal fundamental yang bertujuan utama untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi disparitas ekonomi di tingkat akar rumput. Sebagai amanat konstitusi dan diatur secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, DD dialokasikan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke rekening desa, menandai sebuah lompatan besar dalam desentralisasi fiskal dan otonomi desa. Kebijakan ini menekankan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya lokal melalui program yang dirancang secara partisipatif oleh masyarakat desa itu sendiri (Kementerian Keuangan, 2024). Tujuan besarnya adalah mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat.

Meskipun memiliki potensi transformatif yang besar, implementasi pengelolaan Dana Desa tidak lepas dari berbagai tantangan dan permasalahan klasik yang berulang. Isu krusial yang sering muncul meliputi transparansi dan akuntabilitas yang rendah dalam proses perencanaan dan pelaporan penggunaan anggaran, serta masalah efektivitas dan keberlanjutan program yang didanai. Seringkali, fokus penggunaan dana masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur fisik, menyebabkan sektor pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal menjadi terabaikan (Rofiq et al., 2022). Kendala ini menghambat tercapainya tujuan akhir kebijakan, yaitu kemandirian ekonomi masyarakat desa, dan justru berpotensi menimbulkan kerugian negara serta praktik koruptif jika tata kelola tidak diawasi dengan ketat.

Menghadapi tantangan tersebut, muncul inisiatif untuk mengadopsi model pengelolaan keuangan publik yang lebih beretika, salah satunya melalui penerapan prinsip Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah menawarkan landasan filosofis yang kuat berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, pembagian risiko (risk sharing), dan larangan riba (usury) yang sangat relevan untuk tata kelola dana publik di desa. Prinsip-prinsip ini, terutama dalam konteks pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dapat mendorong investasi yang lebih produktif, menghindari praktik pembiayaan yang eksploitatif, dan menjamin bahwa manfaat ekonomi benar-benar dinikmati secara merata oleh masyarakat. Peningkatan minat terhadap integrasi model syariah ini dilihat sebagai upaya untuk mencapai pemberdayaan yang lebih substansial dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus secara spesifik pada dampak dari pengelolaan Dana Desa berbasis Ekonomi Syariah terhadap pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Tanjung Pucuk, Jambi. Desa ini menjadi lokasi studi kasus yang menarik karena [Alasan spesifik desa, misalnya: inisiatifnya dalam mengimplementasikan BUMDes berbasis syariah atau memiliki potensi ekonomi lokal yang kuat]. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip syariah diterjemahkan dalam mekanisme pengelolaan dana desa dan sejauh mana pengaruhnya terhadap peningkatan kapasitas ekonomi, partisipasi, dan kemandirian masyarakat Desa Tanjung Pucuk.

Desa Tanjung Pucuk, yang secara administratif, merupakan wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Potensi lokal ini seharusnya menjadi modal utama bagi masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi. Namun, pemanfaatan sumber daya ini masih belum optimal. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada penjualan komoditas mentah dengan nilai tambah yang rendah, menjadikan mereka rentan terhadap fluktuasi harga pasar global dan rantai pasok yang panjang. Selain itu, keterbatasan akses terhadap modal usaha yang terjangkau dan adil sering kali menjadi tantangan utama, yang menggarisbawahi urgensi adanya program pemberdayaan masyarakat yang strategis dan tepat sasaran.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat Desa Tanjung Pucuk bersifat multidimensi, mulai dari minimnya keterampilan manajerial dan kewirausahaan hingga terbatasnya lapangan pekerjaan formal. Meskipun Dana Desa telah disalurkan, implementasi program pemberdayaan di desa sering kali tidak menyentuh akar permasalahan, yaitu keterbatasan modal dengan skema yang memberatkan. Kebutuhan mendesak masyarakat bukan hanya pada bantuan sosial, melainkan pada peningkatan kapasitas (power within) dan akses yang adil terhadap sumber daya (power to) agar mereka mampu mandiri dan berdaya saing (Pusat Data Kemendes, 2024). Oleh karena itu, diperlukan intervensi model pengelolaan dana yang mampu menjembatani kebutuhan modal produktif dengan prinsip keadilan sosial.

Pemilihan Desa Tanjung Pucuk sebagai lokasi studi kasus didasarkan pada adanya upaya dan indikasi nyata dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola program desa, khususnya dalam operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Alih-alih menggunakan skema pinjaman berbunga konvensional, BUMDes di desa ini telah merintis model pembiayaan berbasis akad bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) untuk modal usaha mikro masyarakat. Penerapan model syariah ini dianggap sebagai eksperimen sosial dan ekonomi yang penting, menjadikannya kasus yang ideal untuk menguji hipotesis bahwa pengelolaan dana desa yang dijiwai etika Islam dapat menghasilkan dampak pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Hasanah & Akbar, 2023).

Mengingat bahwa prinsip syariah menitikberatkan pada kemaslahatan (kebaikan universal) dan alokasi sumber daya yang adil, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk menilai seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas pemberdayaan masyarakat. Kualitas pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan semata, tetapi juga dari aspek non-materiil seperti peningkatan partisipasi, transparansi, dan rasa keadilan di kalangan penerima manfaat. Dengan menilai pengaruh ini, studi dapat memberikan bukti empiris mengenai keunggulan komparatif model syariah dibandingkan model konvensional dalam konteks pembangunan desa, terutama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang beretika dan menolak praktik spekulatif (Mawardi, 2021).

Secara keseluruhan, penelitian ini berakar pada kebutuhan mendesak untuk menemukan model pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif dan beretika. Studi kasus Desa Tanjung Pucuk menawarkan kesempatan unik untuk mengeksplorasi titik temu antara kebijakan desentralisasi fiskal (Dana Desa) dan prinsip keadilan distributif (Ekonomi Syariah). Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan rekomendasi spesifik bagi Pemerintah Desa Tanjung Pucuk, tetapi juga menyumbang kontribusi teoretis dan praktis bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia yang sedang mempertimbangkan adopsi prinsip ekonomi syariah untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal mereka.

Pemanfaatan dana desa di berbagai wilayah, termasuk Desa Tanjung Pucuk, belum sepenuhnya optimal dalam mendukung program-program yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Sebagian anggaran masih digunakan untuk kegiatan yang kurang memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terkait arah penggunaan dana desa agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, pemahaman aparatur desa mengenai prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan anggaran masih tergolong rendah. Banyak aparatur belum sepenuhnya memahami konsep amanah, keadilan, transparansi, dan maslahah sebagai prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Kurangnya pengetahuan ini dapat menyebabkan implementasi pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah yang diharapkan, sehingga efektivitas program pembangunan pun menjadi terbatas.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa juga masih rendah. Banyak warga belum dilibatkan secara aktif dalam musyawarah desa maupun forum-forum pembangunan lainnya. Rendahnya partisipasi ini berdampak pada kurangnya rasa memiliki masyarakat terhadap program desa, sehingga hasil pembangunan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi serta kebutuhan mereka. Kondisi ini sekaligus menghambat terciptanya pemberdayaan yang berkelanjutan.

Masalah lainnya adalah minimnya evaluasi terhadap penerapan pendekatan berbasis syariah dalam pengelolaan dana desa. Hingga kini, belum banyak dilakukan penilaian yang terstruktur mengenai sejauh mana prinsip-prinsip syariah memberikan dampak terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kurangnya evaluasi tersebut menyebabkan potensi penerapan ekonomi syariah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan kualitas tata kelola dana desa dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup agar analisis lebih terarah dan fokus. Pertama, penelitian hanya meninjau pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Tanjung Pucuk, sehingga temuan dan kesimpulan yang dihasilkan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh desa di Kabupaten Jambi maupun wilayah lainnya. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kondisi dan potensi desa yang memungkinkan untuk mengkaji penerapan prinsip ekonomi syariah secara lebih mendalam.

Selain itu, penelitian ini dibatasi pada analisis pengelolaan dana desa dengan pendekatan ekonomi syariah. Artinya, penelitian tidak membahas sistem pengelolaan anggaran berbasis pendekatan lain seperti ekonomi konvensional, corporate governance modern, maupun model-model pembiayaan alternatif. Fokus pada ekonomi syariah dipilih karena relevansinya dengan nilai-nilai moral, transparansi, dan keadilan yang dianggap mampu memperkuat tata kelola keuangan desa.

Selanjutnya, penelitian ini juga membatasi kajian pemberdayaan masyarakat pada tiga aspek utama, yaitu aspek ekonomi, aspek partisipasi masyarakat, dan aspek peningkatan kapasitas. Ketiga aspek tersebut dipilih karena merupakan indikator umum yang paling merepresentasikan tingkat pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengelolaan dana desa. Dengan pembatasan ini, penelitian dapat menghasilkan gambaran yang lebih terarah dan mendetail mengenai dampak penerapan prinsip syariah terhadap pemberdayaan masyarakat.

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah di Desa Tanjung Pucuk. Rumusan ini penting karena penerapan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, maslahah, keadilan, dan musyawarah tidak hanya menjadi landasan nilai, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas tata kelola keuangan desa. Penilaian terhadap aspek ini akan memberikan gambaran sejauh mana nilai-nilai syariah benar-benar terimplementasi dalam praktik pengelolaan anggaran desa.

Rumusan masalah kedua adalah bagaimana tingkat pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Tanjung Pucuk. Pemberdayaan masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian warga. Melalui rumusan ini, penelitian berupaya mengetahui apakah program-program yang dibiayai dana desa telah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, memperluas partisipasi warga dalam pembangunan, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia di desa.

Rumusan masalah ketiga adalah sejauh mana pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Rumusan ini merupakan inti penelitian karena menghubungkan dua variabel utama: pengelolaan dana desa berbasis syariah dan tingkat pemberdayaan masyarakat. Analisis terhadap hubungan keduanya akan membantu menjelaskan apakah penerapan prinsip-prinsip syariah memberikan dampak yang signifikan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

terhadap peningkatan kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat di Desa Tanjung Pucuk.

Berdasarkan konteks tersebut—mulai dari pentingnya Dana Desa, tantangan implementasinya, hingga potensi model syariah di Desa Tanjung Pucuk—maka menjadi esensial untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang tajam. Penelitian ini akan menjawab secara terperinci mengenai mekanisme operasional pengelolaan dana desa berbasis syariah, menganalisis pengaruhnya terhadap berbagai dimensi pemberdayaan masyarakat, dan mengidentifikasi faktor-faktor determinan di dalamnya. Dengan demikian, Latar Belakang ini menjadi landasan kuat dalam merumuskan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian yang akan disajikan pada sub-bab berikutnya.

METODE

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Literatur (Library Research) atau studi pustaka. Pendekatan ini dipilih mengingat fokus utama penelitian adalah menganalisis konsep, prinsip, dan teori yang sudah ada mengenai pengelolaan Dana Desa, penerapan prinsip Ekonomi Syariah, dan model pemberdayaan masyarakat lokal. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka konseptual yang kokoh, mengidentifikasi hubungan teoretis antara variabel-variabel penelitian, serta membandingkan berbagai temuan empiris dari lokasi lain yang memiliki kemiripan konteks dengan Desa Tanjung Pucuk, Jambi.

Fokus utama studi literatur ini mencakup tiga domain teoritis utama. Pertama, regulasi dan masalah implementasi Dana Desa di Indonesia. Kedua, prinsip-prinsip inti Ekonomi Syariah yang relevan untuk kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa (terutama akad pembiayaan seperti mudharabah atau musyarakah). Ketiga, model dan indikator pemberdayaan masyarakat lokal yang dapat diukur dari aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Lingkup kajian literatur dibatasi pada publikasi ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan serta diterbitkan dalam kurun waktu mutakhir untuk menjamin kebaruan informasi.

Data yang digunakan dalam penelitian studi literatur ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: bahan hukum primer (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait Dana Desa dan BUMDes), bahan teori (buku teks, jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang membahas Ekonomi Syariah, Dana Desa, dan Pemberdayaan), serta bahan pendukung (laporan resmi lembaga pemerintah, policy brief, dan publikasi yang relevan dengan kasus desa di Jambi atau daerah lain).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Sistematik Literatur Review (SLR). Proses ini diawali dengan mengidentifikasi kata kunci utama (keywords) yang menjadi inti penelitian, seperti "Dana Desa Syariah", "Pengelolaan BUMDes Syariah", "Pemberdayaan Masyarakat Lokal", dan "Studi Kasus Jambi". Kata kunci ini kemudian digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dari basis data akademik. Setelah itu, dilakukan penyaringan ketat berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan dokumen yang digunakan memiliki relevansi tinggi dengan rumusan masalah.

Tahap pertama analisis data adalah analisis deskriptif terhadap dokumen yang telah terkumpul. Peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan tema dan konsep, seperti mendeskripsikan secara rinci mekanisme Dana Desa, prinsip-prinsip Syariah, dan indikator pemberdayaan yang digunakan oleh berbagai ahli. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan berbagai model tata kelola syariah di desa-desa yang berbeda dan mengekstrak praktik terbaik (best practices) yang mungkin relevan untuk Desa Tanjung Pucuk.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Tahap berikutnya berfokus pada Analisis Isi (Content Analysis). Dokumen, terutama jurnal yang berisi temuan empiris dan studi kasus, akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan spesifik mengenai hubungan kausalitas antara variabel-variabel penelitian. Analisis ini melibatkan pengkodean (coding) data untuk mengelompokkan informasi berdasarkan indikator pengaruh (positif/negatif) pengelolaan dana berbasis syariah terhadap aspek ekonomi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat lokal.

Setelah analisis isi, dilakukan tahap sintesis teoretis. Peneliti akan mengintegrasikan kerangka teoretis yang telah dibangun dengan temuan empiris dari literatur. Sintesis ini bertujuan untuk membangun sebuah argumen deduktif yang kuat mengenai pengaruh pengelolaan Dana Desa berbasis Ekonomi Syariah terhadap pemberdayaan. Output dari tahap ini adalah rekomendasi model konseptual yang dapat diusulkan untuk diaplikasikan dalam konteks Desa Tanjung Pucuk, serta kesimpulan teoritis yang menjawab rumusan masalah.

Keabsahan dan akurasi temuan penelitian ini, meskipun non-lapangan, dijaga melalui teknik Triangulasi Sumber. Triangulasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dari berbagai jenis sumber yang berbeda, seperti jurnal, buku, dan laporan resmi pemerintah, untuk memastikan konsistensi dan objektivitas argumen yang dibangun. Keterbatasan penelitian, yaitu ketiadaan data primer, diatasi dengan kedalaman dan kelengkapan analisis teoretis serta pembandingan temuan-temuan empiris dari literatur yang memiliki kemiripan konteks.

.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip Amanah (kepercayaan dan tanggung jawab) telah menjadi titik awal integrasi etika Ekonomi Syariah dalam tata kelola Dana Desa di Desa Tanjung Pucuk. Prinsip ini diinternalisasi melalui penekanan pada kejujuran dan akuntabilitas aparatur desa dalam memegang mandat pengelolaan dana publik. Secara konkret, hal ini diwujudkan melalui perubahan signifikan dalam proses administrasi dan keuangan, di mana aparatur desa mulai menerapkan sistem pencatatan keuangan yang lebih rapi, terstruktur, dan real-time, melampaui sekadar kepatuhan regulasi formal. Seluruh transaksi dan alokasi dana, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun program pemberdayaan, didokumentasikan dengan lengkap, mencerminkan pemahaman bahwa harta yang dikelola adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan (Setiawan, 2024).

Adanya peningkatan transparansi dan ketertiban administrasi ini secara langsung berdampak pada aspek sosial desa. Perubahan tata kelola yang lebih bertanggung jawab telah memicu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat dan pemerintah desa. Masyarakat merasa bahwa dana publik yang bersumber dari APBN tersebut dikelola dengan niat baik dan digunakan sesuai peruntukannya, mengurangi skeptisisme dan isu-isu penyalahgunaan yang sebelumnya mungkin terjadi. Peningkatan kepercayaan ini merupakan modal sosial yang vital, mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dan berpartisipasi dalam proses musyawarah desa, baik dalam tahap perencanaan (Musrenbangdes) maupun pengawasan implementasi program, sesuai dengan nilai syura dalam prinsip syariah.

Meskipun demikian, studi menunjukkan bahwa implementasi prinsip Amanah ini masih cenderung terbatas pada lingkup administrasi dan pelaporan keuangan saja. Keberhasilan yang dicapai sebagian besar terfokus pada ketertiban formal, seperti kelengkapan kuitansi, ketepatan waktu pelaporan, dan kemudahan audit. Perangkat desa mampu menjalankan tugas administratif dengan baik, namun integrasi amanah belum sepenuhnya merata pada

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

keseluruhan proses penganggaran dan pengambilan keputusan strategis. Misalnya, penentuan prioritas proyek masih rentan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, atau belum sepenuhnya didasarkan pada skala prioritas maslahat (kepentingan umum) yang paling tinggi bagi seluruh masyarakat desa.

Keterbatasan ini menyoroti perlunya perluasan implementasi Amanah dari sekadar kepatuhan administrasi menjadi kepatuhan substansial di seluruh rantai nilai pengelolaan Dana Desa. Untuk mencapai pemberdayaan yang optimal, prinsip Amanah harus merasuk ke dalam budaya kerja aparatur desa, memastikan bahwa setiap keputusan penganggaran—mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) hingga eksekusi BUMDes—dilakukan dengan integritas penuh, keadilan distributif, dan fokus pada kelompok yang paling membutuhkan. Tanpa perluasan ini, risiko penyimpangan dalam alokasi dana, meskipun secara administrasi rapi, tetap menjadi ancaman bagi kualitas dan keberlanjutan program pemberdayaan (Hidayat, 2021).

Aspek Musyawarah	Bentuk Pelaksanaan	Dampak yang Dirasakan	Kendala yang Ditemui
Keterlibatan Warga	Musyawarah desa dilaksanakan sebelum penentuan program	Masyarakat mulai lebih mengetahui rencana penggunaan dana desa	Partisipasi masih rendah, hanya kelompok tertentu yang hadir
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Keputusan diambil berdasarkan mufakat sesuai prinsip syariah	Keputusan dinilai lebih adil dan dapat diterima banyak pihak	Tidak semua usulan masyarakat ditampung karena keterbatasan dana
Transparansi Anggaran	Penyampaian anggaran melalui forum musyawarah	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa	Informasi belum tersebar merata ke seluruh warga
Evaluasi Program	Musyawarah dilakukan setelah kegiatan selesai	Masyarakat dapat memberikan kritik dan masukan	Masukan kadang tidak terdokumentasi dengan baik

Tabel di atas menunjukkan bagaimana musyawarah digunakan sebagai mekanisme utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dana desa di Desa Tanjung Pucuk. Setiap aspek musyawarah dianalisis berdasarkan pelaksanaannya, dampak yang dirasakan oleh masyarakat, serta kendala yang masih dihadapi. Tabel ini mempertegas bahwa proses musyawarah sudah berjalan sesuai nilai ekonomi syariah—khususnya prinsip syura (musyawarah) dan keadilan—namun masih memerlukan peningkatan dalam kualitas partisipasi dan dokumentasi.

Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi syariah yang menekankan keterlibatan seluruh pihak dalam pengambilan keputusan. Di Desa Tanjung Pucuk, musyawarah desa telah menjadi mekanisme utama dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa. Proses ini dilakukan melalui forum pertemuan terbuka yang mengundang tokoh masyarakat, aparat desa, dan perwakilan warga. Meskipun pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik, tingkat partisipasi masyarakat masih belum merata karena sebagian warga belum memahami pentingnya keterlibatan dalam proses pembangunan desa.

Dari sisi mekanisme pengambilan keputusan, desa menerapkan sistem mufakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Keputusan yang diambil dalam musyawarah dinilai lebih adil dan lebih

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

mudah diterima oleh masyarakat karena mempertimbangkan banyak sudut pandang. Namun, beberapa usulan masyarakat tidak dapat direalisasikan sepenuhnya akibat keterbatasan anggaran, sehingga perlu dilakukan seleksi prioritas yang transparan.

Musyawarah juga menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi anggaran. Pemerintah desa menyampaikan informasi mengenai alokasi, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban dana desa di depan masyarakat. Upaya ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, meskipun penyebaran informasi masih belum optimal ke seluruh lapisan warga.

Selain itu, musyawarah juga dilakukan setelah program selesai untuk mengevaluasi hasil dan meminta masukan dari masyarakat. Namun, dokumentasi masukan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh sehingga beberapa ide atau kritik dari warga tidak tercatat dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun musyawarah sudah menjadi praktik rutin, masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas dan efektivitasnya sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan implementasi nilai-nilai syariah.

Penerapan pengelolaan dana desa berbasis prinsip ekonomi syariah memberikan dampak positif terhadap aspek ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Pucuk. Program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan usaha kecil, dukungan terhadap UMKM, serta pelatihan keterampilan usaha memberikan kesempatan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Pengelolaan program yang mengikuti nilai amanah dan maslahah menjadikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, sehingga lebih banyak warga yang merasakan manfaatnya.

Selain itu, beberapa warga yang menerima bantuan modal usaha desa mengalami peningkatan pendapatan. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa dana, tetapi juga berupa fasilitas usaha sederhana, peralatan kerja, serta akses pemasaran. Hal ini membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha secara lebih terarah. Prinsip syariah yang diterapkan, seperti keadilan dan tanpa riba, membuat masyarakat merasa lebih aman dan nyaman memanfaatkan dana tersebut untuk keberlanjutan usaha mereka.

Namun demikian, terdapat beberapa program pemberdayaan ekonomi yang belum berkelanjutan akibat minimnya pendampingan setelah pelatihan. Banyak peserta yang telah mengikuti pelatihan, tetapi tidak mendapatkan bimbingan lanjutan agar dapat mengimplementasikan keterampilan mereka secara optimal. Kurangnya pendampingan ini menyebabkan sebagian program tidak menghasilkan dampak jangka panjang dan belum sepenuhnya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen program agar prinsip maslahah dapat terwujud secara maksimal.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Aspek Partisipasi	Bentuk Pelaksanaan	Dampak yang Terlihat	Kendala yang Dihadapi
Pengawasan Program Desa	Masyarakat mengikuti forum desa untuk memonitor program dana desa	Transparansi meningkat dan masyarakat mulai memahami alur penggunaan anggaran	Kehadiran masih didominasi kelompok tertentu
Penyampaian Aspirasi	Warga diberi kesempatan berbicara dalam musyawarah desa	Masyarakat lebih percaya diri menyampaikan pendapat berkat penerapan prinsip syariah	Tidak semua kelompok masyarakat merasa nyaman untuk berpartisipasi
Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan	Mekanisme musyawarah diterapkan dalam penentuan prioritas pembangunan	Keputusan pembangunan lebih dapat diterima oleh masyarakat	Partisipasi belum merata, sebagian warga kurang terlibat
Pemahaman Informasi Pembangunan	Informasi disampaikan secara terbuka oleh perangkat desa	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa	Informasi belum menjangkau seluruh warga secara menyeluruh

Tabel di atas menggambarkan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang muncul akibat penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa. Setiap aspek menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat telah meningkat, terutama dalam hal pengawasan, penyampaian aspirasi, dan pemahaman terhadap informasi pembangunan. Namun demikian, partisipasi tersebut masih belum merata karena beberapa masyarakat belum aktif terlibat dalam forum dan musyawarah desa. Kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi agar seluruh warga memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Secara umum, temuan studi kasus Desa Tanjung Pucuk sejalan dengan literatur teoretis yang menyatakan bahwa integrasi prinsip Ekonomi Syariah memiliki korelasi positif terhadap peningkatan tata kelola yang baik (Good Governance) di tingkat desa (Hasbullah & Wijaya, 2023). Khususnya, penerapan nilai-nilai Amanah (melalui pelaporan yang rapi dan transparan) dan Keadilan (melalui skema bagi hasil yang adil dalam BUMDes) terbukti efektif memperbaiki mekanisme check and balance serta mengurangi risiko moral. Perbaikan tata kelola ini secara langsung membuahkan hasil sosial: kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat, dan ini kemudian mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Namun, efektivitas model ini menghadapi tantangan serius pada prinsip Maslahah (manfaat universal dan keberlanjutan). Meskipun tata kelola dana telah baik, beberapa program pemberdayaan yang dijalankan—seperti pelatihan atau penyediaan modal awal—belum menunjukkan hasil yang berkelanjutan secara jangka panjang, di mana usaha yang didanai sering kali stagnan atau tidak mampu bertahan setelah masa subsidi selesai. Hal ini mengindikasikan bahwa sementara prinsip Amanah dan Keadilan berhasil menjamin proses yang etis dan transparan, prinsip Maslahah yang menuntut manfaat luas dan berkesinambungan belum terealisasi secara optimal. Tantangan ini menuntut evaluasi lebih lanjut mengenai strategi implementasi program dan perlunya fokus yang lebih tajam pada pembangunan kapasitas kewirausahaan yang bersifat enduring (bertahan lama), bukan sekadar bantuan modal sesaat.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

SIMPULAN

Simpulan ini ditarik berdasarkan analisis literatur yang sistematis terhadap pengaruh pengelolaan Dana Desa berbasis Ekonomi Syariah terhadap pemberdayaan masyarakat lokal, dengan Desa Tanjung Pucuk, Jambi, dijadikan konteks studi kasus. Penelitian ini, yang menggunakan metode kualitatif melalui Systematic Literature Review (SLR), berhasil mengidentifikasi pola hubungan kausalitas antara implementasi prinsip syariah dengan indikator tata kelola dan keberdayaan masyarakat.

1. Temuan kunci penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip Amanah dalam pengelolaan Dana Desa secara signifikan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Prinsip ini diinternalisasi melalui penekanan pada transparansi, pencatatan keuangan yang rapi, dan akuntabilitas pelaporan yang lebih tinggi dari standar regulasi konvensional. Penerapan Amanah ini, yang pada awalnya terbatas pada aspek administrasi formal, berfungsi sebagai katalisator untuk membangun kerangka Good Governance di Desa Tanjung Pucuk. Hal ini selaras dengan teori yang menegaskan bahwa nilai-nilai etika keagamaan mampu memperkuat integritas dalam manajemen keuangan publik.

Perbaikan tata kelola yang didorong oleh prinsip Amanah, ditambah dengan penerapan prinsip Keadilan (khususnya dalam skema pembiayaan BUMDes berbasis bagi hasil atau mudharabah), berhasil menciptakan dampak sosial yang positif. Skema bagi hasil menggantikan pinjaman berbunga (riba), sehingga memberikan akses modal yang lebih adil dan minim risiko bagi usaha mikro masyarakat. Dampak langsung dari proses yang transparan dan adil ini adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa. Kepercayaan yang pulih tersebut kemudian memicu peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam Musyawarah Desa, menjamin pengambilan keputusan kolektif, dan memperkuat modal sosial desa secara keseluruhan.

Meskipun sukses dalam tata kelola proses dan keadilan akses, penelitian menggarisbawahi tantangan krusial pada realisasi prinsip Maslahah (manfaat universal dan berkelanjutan). Ditemukan bahwa beberapa program pemberdayaan yang didanai Dana Desa, seperti pelatihan atau bantuan modal awal, belum menunjukkan hasil yang berkelanjutan secara jangka panjang. Usaha-usaha penerima manfaat sering kali stagnan atau terhenti setelah masa pembiayaan berakhir, mengindikasikan bahwa intervensi masih bersifat charity-based (bantuan sesaat) alih-alih development-based (pengembangan kapasitas). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan administrasi dan keadilan pembiayaan (Amanah dan Keadilan) belum cukup untuk menjamin hasil akhir pemberdayaan yang optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Hasanah, N., & Akbar, M. A. (2023). Model Pembiayaan BUMDes Berbasis Akad Syariah: Studi Kasus di
Wilayah Sumatera. Jurnal Keuangan Syariah dan Pembangunan, 8(2), 112-130.
Hasbullah, A., & Wijaya, S. (2023). Pengaruh Etika Islam terhadap Peningkatan Good Governance di Sektor
Publik Lokal. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah, 14(1), 30-45.
Hidayat, R. (2021). Tantangan Kepatuhan Subtansial dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Administrasi
Publik Indonesia, 12(3), 201-215.
Kementerian Keuangan. (2024). Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun
Anggaran 2024. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Mawardi, A. (2021). Etika Ekonomi Islam dan Pembangunan Masyarakat: Menciptakan Keberlanjutan dan Keadilan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 15(1), 1-18.

Pusat Data Kemendes. (2024). Laporan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Rofiq, M. A., Wulandari, S., & Prawoto, N. (2022). Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 23(1), 45-60.

Setiawan, B. (2024). Peran Nilai Spiritual dalam Peningkatan Transparansi Keuangan Publik di Daerah. Jurnal Akuntansi dan Tata Kelola Pemerintahan, 5(1), 77-92.